



Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan)

Government Collaboration on Integrated Development of Coastal Areas in Tangerang Regency through Coastal Community Development Movement (Gerbang Mapan)

Yusuf Fadli, Adie Dwiyanto Nurlukman

Government Science Study Program, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

fadli8daglish@gmail.com, adiedwiyanto@gmail.com

Abstrak

Kolaborasi pemerintah melalui partisipasi masyarakat dan sektor lainnya merupakan unsur keberlanjutan yang penting dalam pembangunan daerah. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang semakin populer adalah manajemen kolaboratif dengan pendekatan tata pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan kerja kolaboratif yang terjadi pada setiap pelaku yang terlibat dalam pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui studi literatur dan studi lapangan dalam bentuk observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dalam pengembangan wilayah pesisir masih sangat minim bahkan di tingkat internal pemerintah daerah. Para pihak hanya fokus pada tugas dan peran masing-masing dan sangat minim satu sama lain.

Kata kunci: kolaborasi pemerintah, pengembangan wilayah, wilayah pesisir

Abstract

Collaboration government with citizen participation and other sectors is an element of sustainability that is important in the development of the region. One form of citizen participation that is increasingly popular is collaborative management with a good governance approach. The purpose of this study is to find out how the role and collaborative work that occurs in every actor involved in the development of coastal areas in Tangerang Regency. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data sources were obtained through literature study and field studies in the form of observations and interviews. The results of the study show that government collaboration in the development of the coastal area is still very minimum even at the internal level of the regional government. The parties only focus on their respective duties and roles and are very minimal in each other.

Keywords: Collaborative Government, Regional Development, Coastal Areas

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai pengembangan wilayah pesisir merupakan topik yang menarik untuk di diskusikan dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir (Dahuri & Dutton, 2000; Rudyanto, 2004). Kemiskinan wilayah pesisir, bahkan mengakibatkan marjinalisasi secara ekonomi terhadap wilayah pesisir. Tetapi, walaupun termarginalkan secara ekonomi, wilayah pesisir dengan keunggulannya terutama dalam hal industri perikananannya, tidak dapat di anggap remeh dalam ketahanan pangan, nutrisi, matapencaharian, rural development, dan pengentasan kemiskinan (Jentoft & Chuenpagdee, 2015).

Selama ini mayoritas kawasan pesisir di Indonesia sering terabaikan bahkan tergilas oleh derap pembangunan yang lebih berkiblat kepada daratan. Kemiskinan menjadi kosakata yang akrab di telinga publik ketika bersentuhan dengan isu pengelolaan kawasan pesisir. Berdasarkan data Badan Pusat Staistik, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan



pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang atau 10,86 % dari total jumlah penduduk Indonesia dan jumlah penduduk miskin yang hidup di daerah pesisir cukup besar, yakni mencapai 32,14 persen dari jumlah total penduduk miskin Indonesia (Sulaiman, 2015).

Berbanding terbalik dengan kemiskinan yang terjadi, ternyata industri perikanan yang di miliki wilayah pesisir justru merupakan salah satu sektor dari industri makanan yang mengalami perkembangan tercepat (Bostock et al., 2010; Ting et al., 2015). Hal ini memperlihatkan jika wilayah pesisir dengan sektor perikananannya memiliki potensi yang signifikan jika bisa di manajemen dan di kelola dengan baik. Beberapa pakar perikanan menyepakati jika sumber konflik dalam manajemen perikanan adalah hubungan antara sumber daya perikanan dengan kesejahteraan manusia, dan hal ini merlukan intervensi kebijakan dari pemerintah (Pomeroy, 1995).

Pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla terdapat salah satu program didalam *Nawacita* yang berisi tentang tujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan. Yakni dengan memfokuskan program kelautan yang ada untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara maritim terkuat di dunia yang dapat ditempuh melalui berbagai macam cara salah satunya pembangunan di wilayah pesisir Indonesia(Kumolo, 2017).

Melalui hak otonomi daerah dalam Undang-undang nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki tugas dan peran yang besar dalam mengelola potensi wilayah dan mensejahterakan seluruh masyarakat di wilayah pemerintahannya dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikelola sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah. Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Tangerang yakni potensi alam berupa laut. meskipun belum tereksplorasi dengan baik sehingga masyarakat dipesisir Kabupaten Tangerang dengan sebagian besar berprofesi sebagai nelayan masih tertinggal dalam segi perekonomian dibandingkan dengan masyarakat yang dihidup di wilayah perindustrian.

Adapun Kabupaten Tangerang dalam kacamata wilayah Tangerang Raya, menjadi satu-satunya wilayah yang memiliki luas perairan berupa lautan seluas 377,40 km² dengan luas kawasan pesisir 298,52 km² berdasarkan administrasi kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 7 kecamatan dan 23 Desa pesisir yang terdiri dari Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukadari, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluk Naga, dan Kecamatan Kosambi(Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2013).

Kabupaten Tangerang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang mempunyai luas wilayah 1.337.01 km², dengan pembagian luas darat 959,61 km² dan luas laut 377,40 km² (PDSI KKP, 2013). Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 berada pada posisi 3,37 juta jiwa yang tersebar di 29 kecamatan(BPS Kabupaten Tangerang, 2016). Sedangkan kawasan pesisir Kabupaten Tangerang sendiri terdapat 7 kecamatan dan terdiri dari 23 desa. Penduduk di kawasan ini masih ada yang terbelit dalam persoalan kemiskinan, dimana dari 3,37 juta penduduk Kabupaten Tangerang, terdapat sekitar 7% penduduk miskin yang bertempat tinggal di kawasan pesisir(okezone.com, 2017). Sebagian besar warga miskin di daerah pesisir ini merupakan berprofesi sebagai nelayan yang menggantungkan masa depannya di lautan lepas.

Dari jumlah luas laut yang dimiliki seharusnya mampu membawa masyarakat kabupaten Tangerang khususnya masyarakat pesisir pantai untuk mendapatkan hidup layak dengan kondisi perekonomian yang stabil, namun sayangnya hal tersebut tidak berlaku demikian karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang 2016, Jumlah penduduk kabupaten Tangerang berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2015 memiliki Jumlah penduduk lebih dari 3.300.000 Jiwa(BPS Kabupaten Tangerang, 2016) tersebar di 29



kecamatan yang tersebar di kabupaten Tangerang dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 7 % berada di wilayah pesisir (Antara, 2017). Data tersebut merepresentasikan bahwa kesejahteraan masyarakat terutama yang hidup di wilayah pesisir merupakan salah satu poin utama yang perlu diperhatikan untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara maritime.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di wilayah pesisir, pemerintah Kabupaten Tangerang membuat salah satu program dari 25 prioritas Kabupaten Tangerang yaitu Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) dengan bertujuan menuntaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, dengan tujuan melakukan peningkatan ekonomi serta pengadaan infrastruktur pendukung di wilayah pesisir dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola Sumberdaya alam yang belum terkelola dengan maksimal dengan masa berlaku program pada tahun 2015-2018.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut sekaligus melakukan upaya untuk mengelola dan memberdayakan kekayaan alam berupa laut dan masyarakat pesisir di kabupaten Tangerang untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan juga mendatangkan keuntungan bagi pemerintah Kabupaten Tangerang.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil, yakni pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola dan memberdayakan masyarakat pesisir sehingga dapat melakukan peningkatan kesejahteraan di Kawasan pesisir dengan mendorong agar terciptanya kegiatan usaha masyarakat pesisir yang berdaya guna dan berhasil guna.

Sebagai bentuk pengaktualisasian tugas pemerintah daerah dalam mengelola wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki, maka pemerintah kabupaten Tangerang menjadikan salah satu Kawasan pesisir sebagai salah satu tugas untuk dilakukan pengelolaan sekaligus mengatasi kemiskinan pesisir yang masih terjadi, salah satunya melalui Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) sebagai salah satu program yang dirancang untuk meningkatkan perekonomian pesisir dalam upaya penuntasan kemiskinan.

Berdasarkan data Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), Program Utama Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) difokuskan pada pengembangan ekonomi masyarakat dengan didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan dikuatkan melalui pemberdayaan masyarakat desa dengan tiga program yang terdiri dari program yakni program peningkatan perekonomian, program peningkatan infrastruktur dasar, dan program pemberdayaan masyarakat (PKPT KKP, 2018).

Namun faktanya, berdasarkan kutipan dari Medcom.id, masih terjadi peningkatan angka kemiskinan di kabupaten Tangerang dengan jumlah 760,199 jiwa pada tahun 2011 menjadi 795,252 jiwa pada tahun 2015 (Parisi, 2016). Presentase kemiskinan bersumber dari BPS Provinsi Banten sebesar 5,71 % pada tahun 2015 sedangkan pada tahun 2014 sebelum dijalankannya Program Gerakan Pembangunan Masyarakat pantai kemiskinan hanya mencapai angka 5,26% dan berdasarkan hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Pemerintahan Daerah (RKPD Bappeda) Kabupaten Tangerang program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) berjalan, justru didapati terjadi peningkatan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 2016 yakni sebesar 202,60 dengan presentase 5,86% dengan batas Garis Kemiskinan sebesar Rp.412,609 dibandingkan tahun 2015 dalam jumlah 189,10 jiwa dengan presentase 5,61 % dan batas Garis Kemiskinan sebesar Rp.392,786 (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2017).

Adapun masalah kemiskinan pesisir yang masih dihadapi setelah adanya program Gerbang Mapan disebabkan karena dalam upaya pengetasan kemiskinan adalah belum



adanya pemerataan program pelaksanaan Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) karena pada tahun 2016 pelaksanaan program penguatan ekonomi nelayan dan penguatan ekonomi pembudidayaan ikan/ udang serta penguatan ekonomi pengolahan dan pemasaran lebih difokuskan kepada desa Patranggala, Desa Muara, dan Desa Surya Bahari yang berada di kecamatan Mauk, kabupaten Tangerang. Sedangkan untuk kecamatan lain, lebih difokuskan kepada kegiatan yang berbasis teknis dan pemeliharaan infrastruktur, misalnya yang dilakukan di kecamatan Kronjo, Paku Haji, dan Teluk Naga yakni rehabilitasi TPI setempat yakni TPI kronjo, TPI Cituis, dan TPI Tanjung Pasir.

Berdasarkan hasil pemaparan masalah diatas dalam pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) sejak tahun 2015-2018, penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai peran dari pemerintah daerah lokal, untuk pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Tangerang dan bagaimana kerja kolaboratif antar institusi yang terdapat di sektor pesisir Kabupaten Tangerang.

TINJAUAN PUSTAKA

***Good Governance* dan Kolaborasi Pemerintahan dalam Pengembangan Wilayah Pesisir**

Konsepsi mengenai *good governance* merupakan topik yang terus diperdebatkan sampai saat ini. Sejak dikemukakan oleh World Bank sebagai salah satu faktor yang sangat penting dan signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan pendukung pembangunan (Grindle, 2004; Santiso, 2001). Hingga saat ini perdebatan mengenai *good governance* terus berlanjut dan berkembang. Secara sederhana, *good governance* merupakan sebuah frase yang tersusun dari kata “*good*” dan “*governance*”.

Perkembangan konsep ini justru terjadi pada pengertian *governance*. Berdasarkan pada pengertian sederhana, *governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan, yang kemudian berkembang menjadi sebuah konsep yang mengalami perkembangan berdasarkan oleh fenomena yang ada dengan menghubungkan konsep tersebut dengan pembangunan sosial. Perkembangan tersebut secara umum mengembalikan peran pemerintah kepada fungsi dasarnya untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan, mengurangi permasalahan masyarakat, dan menjadi sector utama dalam pembangunan sosial. Dengan kata lain *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sosial didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada (Vries, 2013). Berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang ada, untuk menciptakan dan menjaga keberlangsungan dalam implementasinya, *good governance* tidak bisa menjadi tanggung jawab tunggal bagi pemerintah saja, tetapi juga memerlukan sektor lain sebagai penyeimbang bagi pemerintah (Cope & Goodship, 1999; Hendriks, 2014; Mungiu-Pippidi, 2015).

Pembangunan mendorong perubahan di beberapa sektor tidak hanya dalam pertumbuhan ekonomi, dan ini terkait dengan beberapa pihak yang memiliki kepentingan mereka sendiri. Pihak-pihak yang terkait tersebut ini kadang-kadang mengalami tumpang tindih dalam kepentingan antara satu sama lain. Hal ini kemudian penghalang untuk mencapai tujuan dan target pembangunan. Kerjasama atau kolaborasi merupakan salah satu solusi untuk mengatasi konflik kepentingan terutama dalam hal pembuatan kebijakan pembangunan.

Kebijakan pembangunan merupakan sesuatu yang bersifat kompleks, munculnya bidang baru yang menarik dalam studi pembangunan seperti gender, ekologi, demokratisasi, *good governance*, pemberdayaan, budaya, komunikasi, globalisasi merupakan suatu poin yang saat ini menonjol dalam agenda pembangunan (Nederveen Pieterse, 2012). Ini juga merupakan alasan mengapa kita perlu membatasi kekuasaan pemerintah untuk berbagi kekuasaan mereka kepada pihak lain.

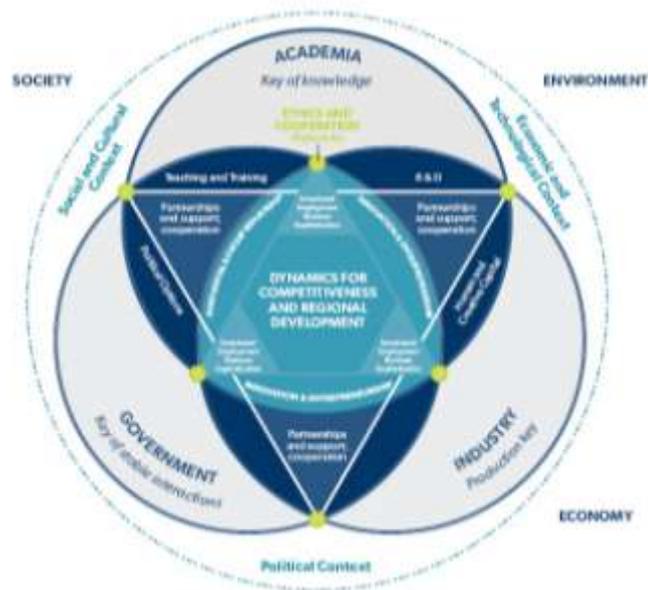


Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak bisa memonopoli pembangunan hanya dengan kekuatan mereka, mereka juga membutuhkan dukungan dari sektor lain untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini Pemerintah perlu melibatkan pihak lain seperti sektor swasta untuk mengembangkan pasar juga masyarakat sipil untuk mengembangkan sumber daya manusia yang terintegrasi sebagai bentuk upaya mencapai *open government relationship* yang merupakan salah satu poin dari implementasi *good governance*. Dengan jenis kemitraan yang terintegrasi, mudah-mudahan pemerintah bisa memahami masalah lebih dalam dan dapat melahirkan kebijakan yang efektif sebagai solusi masalah tersebut.

Salah satu model untuk mendukung integrasi kolaboratif dari pemerintah adalah kerangka konseptualisasi triple helix. Konsep Triple Helix sebagai salah satu upaya untuk membentuk kerangka teoritis untuk sebuah program atau kebijakan yang mendorong hubungan antara pemerintah-swasta-akademia (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995, 2000, 2014; Jacobs, 2006).

Salah satu model triple helix yang dikembangkan oleh Luis Farinha dan João J. Ferreira pada tahun 2013. Model ini menetapkan dan mengembangkan model konseptual triangulasi triple helix. Dengan mengadopsi model ini secara tidak langsung dapat menjelaskan dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya inovasi dan kewirausahaan dalam interaksi dinamis dari triple helix sebagai salah satu faktor dalam meningkatkan daya saing daerah dan pembangunan (Farinha & Ferreira, 2013).

Gambar 1
Triangulasi *Triple Helix* (Farinha & Ferreira, 2013)



Relasional triangulasi Triple Helix model mencerminkan interaksi hubungan antar tiga bidang kelembagaan (universitas - Industri - Pemerintah) yang dirancang untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dari suatu daerah dalam rangka menciptakan tindakan saling terkait di skenario multi-level. Model triangulasi Triple Helix, berfungsi sebagai titik tolak untuk merancang dan melaksanakan penelitian berbasis empiris dan erat kaitannya untuk memberikan respon terkait interaksi (antar aktor) yang terjadi dalam berbagai variasi bidang (sosial, ekonomi, politik, dan budaya). Hal ini, didasarkan pada asumsi dari hubungan positif antara dinamika inovasi dan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing untuk mendorong pembangunan daerah (Farinha & Ferreira, 2013).



Kerangka model dari triple helix sebenarnya dibuat berdasarkan tingkat struktur aktor yang terlibat pada level negara (pemerintah pusat). Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kerangka triple helix yang ada untuk mendukung studi dukungan untuk tingkat regional dan wilayah dalam lingkup yang lebih kecil, kerangka model yang ada perlu dimodifikasi (Rho, 2014). Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Wellbrock, Roep, & Wiskerke (2012) sebagai bentuk modifikasi triple helix dalam upaya mendukung proses pembelajaran dan inovasi di daerah ada beberapa langkah yang harus diikuti. Komponen kerangka kerja perlu disesuaikan untuk memperhitungkan keragaman aktor dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pembangunan berbasis daerah pedesaan.

METODE

Metode yang dipergunakan dalam penelitian kali ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui metode penelitian kualitatif, peneliti harus mampu menjelaskan hal-hal terkait dengan subyek penelitian dengan menggunakan bahasa yang telah dipilih. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari Individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau masalah kemanusiaan (Creswell & Creswell, 2017).

Oleh sebab itu peneliti mempergunakan metode kualitatif dalam penelitian ini untuk melihat dan mengetahui proses dan *progress* kegiatan pengembangan wilayah pesisir melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) di Kabupaten. Penelitian ini akan menganalisa bagaimana upaya yang dilakukan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang dan melihat hasil yang telah dilakukan dengan menekan pada keteraturan antaran kegiatan pengenalan kebutuhan, perencanaan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi langsung apakah kegiatan tersebut sesuai dengan strategi dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam *RoadMap* Gerbang Mapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintahan Lokal dalam Pengembangan Kawasan Pesisir

Program pengembangan kawasan pesisir melalui penyelenggaraan program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai merupakan salah satu dari dua puluh lima program unggulan di Kabupaten Tangerang yang terbentuk karena beberapa isu strategis yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang dan dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2013-2018 yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta disesuaikan dengan Visi dan Misi kepala daerah.

Adapun inisiasi membentuk sebuah program pembangunan masyarakat pantai diawali dengan misi kedua pemerintah Kabupaten Tangerang yang berisikan Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan daya saing masyarakat. Hal tersebut dilakukan mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang pada periode 2013-2018, yakni untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang cerdas, makmur, religius, dan berwawasan lingkungan.

Dalam hal ini sebagai suatu pengejawantahan dari visi pemerintah kabupaten dalam mengembangkan wilayah pesisir, Gerakan membangun masyarakat pantai menjadi salah satu strategi yang dilaksanakan dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018. Oleh sebab itu, Gerbang Mapan merupakan program yang ditujukan untuk menjalankan strategi dalam Rencana pembangunan Jangka



Menengah tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan ekonomi dari wilayah dan masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018, Program Gerbang Mapan merupakan program yang dirumuskan untuk merealisasikan misi pemerintah kabupaten Tangerang tersebut dalam kegiatan peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah untuk menciptakan daya saing antar daerah dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, dan peran peningkatan ekonomi daerah dalam perekonomian regional serta mendukung aktivitas ekonomi dengan beberapa sasaran yang ada, yakni meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesempatan kerja.

Gerakan membangun masyarakat pantai menjadi salah satu strategi yang dilaksanakan dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018. Oleh sebab itu, Gerbang Mapan merupakan program yang ditujukan untuk menjalankan strategi dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan ekonomi dari wilayah dan masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah tahun 2013-2018, salah satu cara yang ditempuh sebelum melaksanakan sebuah program pemerintah adalah dengan membuat sebuah perencanaan dan strategi, penanggungjawab serta rencana yang akan dijalankan berdasarkan dengan kebutuhan dan sasaran atas program yang hendak dijalankan. Hal tersebut bertujuan untuk pelaksanaan program yang telah dijalankan dapat mencapai tujuan yang telah disasar serta berdampak langsung terhadap masyarakat mengingat program pemerintah secara keseluruhan merupakan program yang berkaitan langsung dengan masyarakat bahkan tidak jarang melibatkan dan menjadikan masyarakat sebagai salah satu sasaran pelaksanaan sebuah program yang dibuat.

Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai atau Gerbang Mapan merupakan program yang memiliki 3 (tiga) pilar dalam melaksanakan pembangunannya, yakni pilar peningkatan ekonomi, pengembangan infrastruktur dasar, dan pengembangan pemberdayaan manusia. Adapun dalam pelaksanaan yang dilakukan dalam Gerbang Mapan sebagai salah satu program unggulan daerah, ketiga pilar tersebut termuat dalam strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dirumuskan dan dikonsentrasikan untuk dilaksanakan dalam program Gerbang Mapan.

Terdapat Sinergitas antara Gerbang Mapan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018, diantaranya adalah meningkatkan produktifitas budidaya air tawar dan air payau, meningkatkan produksi perikanan tangkap, meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, mengembangkan destinasi pariwisata, mengembangkan komoditi icon daerah.

Dalam penelusuran yang peneliti lakukan di lapangan, pada tahap awal pembentukan Gerbang Mapan fokus pembangunan kepada tiga pilar pembangunan yang bertujuan agar pelaksanaan program tepat sasaran. Untuk tujuan tersebut pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan pihak akademisi dari Institut Pertanian Bogor yang memiliki Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL). Langkah ini ditempuh untuk menyusun sebuah strategi, di sini akan melakukan model pengamatan secara mendalam mengenai wilayah pesisir Kabupaten Tangerang sekaligus menyusun pembentukan *RoadMap* Gerbang Mapan yang bertujuan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi dengan meningkatkan infrastruktur dasar dengan cara memberdayakan masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam upaya melaksanakan program unggulan Gerbang Mapan. Maka disusun beberapa isu strategis yang terdapat di 25 (dua puluh lima) desa dari 8 Kecamatan



Pesisir di wilayah Kabupaten Tangerang yang dirumuskan dengan membuat *RoadMap* Program Gerbang Mapan berdasarkan hasil *Forum Group Discussion* (FGD) dari masing-masing kecamatan pesisir dan dokumen yang menunjang data mengenai wilayah pesisir di Kabupaten Tangerang.

Dalam pembuatan *RoadMap* Gerbang Mapan mengundang Kecamatan, Desa, tokoh masyarakat, Kelompok budidaya, Mangrove, misalnya saya kan di budidaya. Dibuatlah list dengan alasannya, akhirnya masuklah budidaya (kedalam isu strategis di *RoadMap*). Pernyataan selanjutnya mengenai pembuatan *RoadMap* yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan arah dan tujuan pelaksanaan Gerbang Mapan agar tujuan dan sasaran pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang tersedia, sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat di desa dan kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang.

Namun berdasarkan data yang didapat dari hasil evaluasi pelaksanaan Gerbang Mapan atas Laporan Dinas Perikanan dan Kelautan menunjukkan bahwa pelaksanaan program Gerbang Mapan kurang disambut dengan antusias yang baik oleh masyarakat pesisir yang tersebar dalam 25 Desa Pesisir dari 8 kecamatan pesisir di Kabupaten Tangerang sebab hanya mampu melibatkan 45 (empat puluh lima) Aparat desa dari 25 (duapuluh lima) Desa pesisir Kabupaten Tangerang. Sehingga dalam pelaksanaan Program Gerbang Mapan sejak tahun 2015-2018 tidak mampu melibatkan seluruh desa dari 8 kecamatan pesisir di kabupaten Tangerang untuk merasakan langsung hasil dari pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan yang ada dalam Gerbang Mapan khususnya kegiatan yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat pesisir di wilayah Kabupaten Tangerang.

Program Gerbang Mapan sendiri, merupakan program yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan di pesisir khususnya dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan kemiskinan yang menjerat masyarakat pesisir. Sehingga pelaksanaan peningkatan ekonomi dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat pesisir melalui cara melibatkan kelompok-kelompok perikanan dan kelompok lain yang bergerak dalam bidang sumberdaya alam pesisir. Mengingat permasalahan pesisir tidak hanya mencangkup urusan perikanan tetapi juga ketersediaan sumberdaya alam yang turut andil dalam menyediakan sumberdaya perikanan yang baik oleh sebab itu pembangunan di wilayah pesisir harus berpegang kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kerja Kolaborasi Intersektoral dalam Pembangunan Wilayah Pesisir.

Dalam perwujudan *good governance*, setidaknya ada tiga prinsip penting yang menjadi perhatian, yaitu transparansi (keterbukaan), partisipasi (keterlibatan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) (David & Gaebler, 1992). Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk pemenuhan kepentingan masyarakat, sehingga pemerintah harus berinteraksi dengan pihak di luar pemerintah dalam hal tatakelola di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Unsur-unsur yang diketahui dalam implementasi *good governance* adalah negara/pemerintah; sector swasta; dan masyarakat sipil (Anggara, 2012).

Pembangunan kawasan pesisir Kabupaten sejak semula sudah menjadi fokus pemerintah Kabupaten, hal ini ditegaskan dalam misi nomer dua dari Bupati Tangerang yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018 yang berbunyi “melakukan peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan daya saing masyarakat”. Ditambahkan bahwa pendekatan pembangunan manusia yang dapat dilakukan oleh



pemerintah adalah dengan cara mengedepankan prinsip pembangunan manusia dalam empat paradigma yakni produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan.

Penegasan pemerintah yang termaktub dalam dokumen negara di atas bukannya tanpa alasan, mayoritas penduduk di 8 kecamatan dan 25 desa berada di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, mayoritas mereka merupakan masyarakat yang menggantungkan hidup kepada aktivitas perikanan, baik perikanan tambak maupun perikanan tangkap. Sekitar 273.991 jiwa penduduk yang berprofesi sebagai nelayan, usaha perikanan menempati tingkat ketiga setelah profesi buruh dan usaha pertanian (PKSPL IPB, 2013). Ini berarti sebagian kehidupan masyarakat sangat bergantung kepada hasil alam dan sumberdaya yang tersedia di wilayah pesisir dan laut. Akan tetapi potensi kelautan dan sumberdaya pesisir yang dimiliki oleh Kabupaten Tangerang belum dioptimalkan sehingga kehidupan nelayannya banyak yang tertinggal secara ekonomi.

Masyarakat pesisir belum terbebas dari masalah ketertinggalan pembangunan yang berakibat kepada terjadinya penurunan kualitas sumberdaya pesisir yang berujung kepada kepada minimnya kegiatan ekonomi masyarakat yang berbasis kepada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang 2016 mengkonfirmasi temuan ini, dengan menyatakan bahwa jumlah penduduk kabupaten Tangerang berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2015 memiliki Jumlah penduduk lebih dari 3.300.000 Jiwa (BPS Kabupaten Tangerang, 2016) tersebar di 29 kecamatan yang tersebar di kabupaten Tangerang dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 7 % berada di wilayah pesisir (okezone.com, 2017).

Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapann) disusun untuk mengatasi problem kemiskinan yang selama ini membelit masyarakat pesisir. Diharapkan program ini akan memberikan dampak langsung kepada peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan terhadap potensi dan sumberdaya di kawasan pesisir. Dalam pelaksanaannya Gerbang Mapan dijalankan dengan melibatkan kelompok-kelompok perikanan dan kelompok lain yang bergerak dalam bidang sumberdaya alam pesisir. Mengingat permasalahan pesisir tidak hanya mencakup urusan perikanan tetapi juga ketersediaan sumberdaya alam yang turut andil dalam menyediakan sumberdaya perikanan yang baik. Oleh sebab itu pembangunan di wilayah pesisir harus berpegang kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam gerbang Mapan, pemerintah berupaya mendorong kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berdaya dan bersinergi dengan kekuatan swasta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Dalam pengembangan di pesisir Kabupaten Tangerang, pemerintah kabupaten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melibatkan kelompok masyarakat di dalam program Gerbang Mapan. Kelompok-kelompok masyarakat dilibatkan untuk fokus kepada persoalan budidaya ikan, industri olahan dan konservasi hutan mangrove.

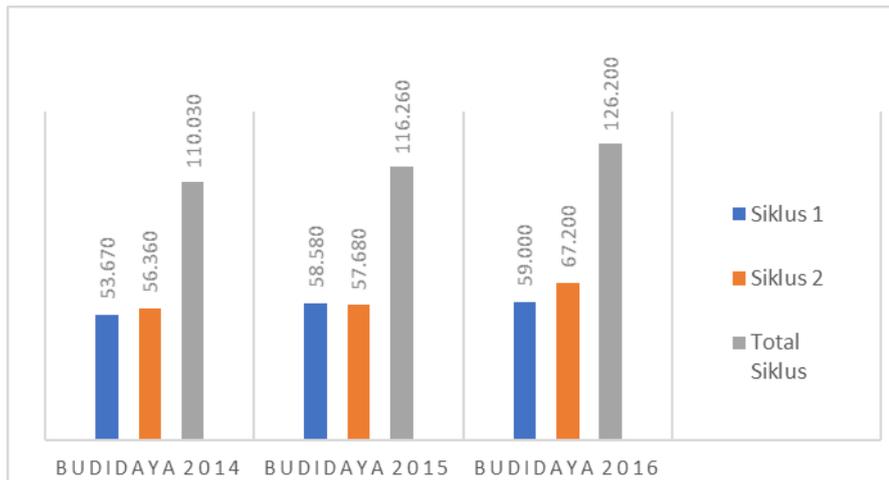
Dalam pelaksanaan program ini masyarakat mulai merasakan dampak positif sejak program tersebut digulirkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Data dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, menerapkan metode budidaya dengan pengelolaan semi Intensif yakni 50% pakan alami & 50% pakan buatan, secara hasil ternyata mampu meningkatkan hasil tambak menjadi 1500-2000 kg/Ha, dibandingkan dengan menerapkan metode pemberian pakan secara tradisional yakni 100% mengandalkan pakan alam, akan menghasilkan panen sebanyak 750 – 1200/ Ha. (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang, 2017).

Di Desa Patramanggala, peningkatan hasil panen juga dialami oleh kelompok Tunas Tambak Mandiri dengan mengikuti arahan dari pemerintah. Kelompok tersebut menyatakan



bahwa hasil yang didapatkan sangat jauh berbeda seperti ketika program Gerbang Mapan belum diadakan, dahulu satu hektar tambak hanya menghasilkan 500 Kg ikan, sekarang di bawah program gerbang Mapan, dalam 1 hektar kita dapat memperoleh 1 ton.

Grafik 1:
Data Hasil Panen Bandeng Sumber: *Kelompok Tunas Tambak*



Peningkatan tersebut tentu ikut berdampak positif kepada pendapatan, jumlah hasil panen dan pendapatan yang dilakukan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 6,230 kg selama dua siklus yang dibandingkan pada tahun 2014 dengan selisih total pendapatan dari komoditas bandeng sebesar Rp. 248.353.000 dengan selisih pendapatan per hektar yang dihasilkan oleh nelayan tambak kelompok tunas tambak mandiri mencapai Rp. 2.237.414 begitupun dengan jumlah hasil panen antara tahun 2015 dengan 2016 yang tidak mengalami perubahan signifikan tetapi tetap terjadi peningkatan pendapatan dan hasil panen yang dirasakan oleh anggota kelompok yang diberdayakan dalam program peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dalam Gerbang Mapan.

Keterlibatan pihak swasta dalam program budidaya tambak tampak terlihat dari kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan CV. Prima yang berkedudukan di Karawang, dalam kesepakatannya pihak CV bertugas untuk menjadi pemasok pakan olahan untuk menjamin berhasilnya panen raya ikan pada nantinya.

Peningkatan ekonomi masyarakat juga diupayakan melalui program “*one village one product*”, dalam kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan komoditas wilayah sekitar sebagai produk unggulan untuk dipasarkan ke luar desa tersebut. Salah satu contoh adalah di bidang pengolahan ikan bandeng, pemerintah berkolaborasi dengan kelompok Manggala Putri untuk menjalankan usaha olahan yang berbahan serba ikan bandeng. Pemerintah mengadakan dan mengirimkan para kaum ibu ke berbagai pelatihan tentang usaha rumahan di berbagai tempat. Pasca pelatihan, diharapkan kaum ibu dapat melakukan inovasi-inovasi baru terkait produk olahan ikan bandeng tersebut.

Pembangunan ekonomi di kawasan pesisir akan sangat bergantung kepada sejauhmana ekosistem di pesisir juga tetap lestari. Tanpa perlindungan terhadap lingkungan bukan tidak mungkin usaha-usaha warga yang berhubungan dengan sumber daya di pesisir akan sia-sia. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan abrasi sudah sangat mengkhawatirkan, sejak tahun



1995-2015 daratan yang hilang akibat abrasi mencapai 579,79 hektar (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang, 2017). Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan kelompok masyarakat untuk ikut melakukan konservasi hutan mangrove di kawasan desa Ketapang (Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove), Desa Patra Manggala (Kelompok Tunas Mandiri) dan di Desa Kronjo (Kader Pecinta Lingkungan).

Keterlibatan sector swasta dalam konservasi mangrove ditunjukkan oleh peranan mereka dalam melepaskan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melestarikan keberadaan mangrove di daerah pesisir.

Tabel 1:
Jumlah CSR Untuk Konservasi Mangrove di Desa Patramanggala

No	CSR	Jumlah Penanaman	Tahun
1	PLTU Lontar	2000 bibit	2015
2	PT DOULTON	1500 bibit	2015
3	PT. YKK	1000 bibit	2015
4	PT.CING LUH	1000 bibit	2016
5	PT. PANARUB	1000 bibit	2016
6	PT SAN YOU FOO	1000 bibit	2017
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	48.500 bibit	2017

Sumber : Kelompok Tunas Harapan

Kolaborasi antaran pemerintah Kabupaten, pihak swasta dan kelompok masyarakat di kawasan pesisir mulai dirasakan hasil dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Keberhasilan konservasi hutan mangrove terlihat melalui terbentuknya kawasan “sabuk hijau” (*green belt*) sebagai pencegah abrasi dan tempat hidup ikan-ikan yang sebelumnya sempat menghilang dari kawasan tersebut.

Tugas pembangunan daerah pesisir akan mencapai tujuan bersama apabila penerapan prinsip good governance diterapkan oleh seluruh pihak. Namun demikian apa yang berlaku di pesisir Kabupaten Tangerang melalui program gerbang Mapan masih perlu diuji oleh waktu, apakah ia akan berkelanjutan atau hanya sekedar sementara, akan tetapi terlepas dari itu semua tumbuhnya kesadaran di tengah masyarakat akan kehidupan mereka sendiri merupakan modal yang paling berharga bagi mereka untuk menatap masa depan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program Gerbang Mapan sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah memilih kelompok-kelompok masyarakat pesisir yang memiliki kemampuan dan potensi untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan Dinas kelautan dan perikanan untuk menjadi leading sector sekaligus berperan dalam melaksanakan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan dengan membagi focus pelaksanaan Gerbang Mapan menjadi 3 tahun yakni tahun 2015 difokuskan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dirumuskan dalam FGD pada tahun 2014, tahun 2016 di fokuskan kepada kelompok budidaya tambak dan budidaya mangrove, serta



tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 difokuskan untuk menjalankan kegiatan dalam bidang budidaya mangrove.

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan, Gerbang Mapan dianggap mampu untuk meningkatkan perekonomian kelompok budidaya perikanan dan tambak serta kelompok pengolahan tetapi belum mampu berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat dari desa pesisir di Kabupaten secara keseluruhan yang terjadi karena pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum mampu menyentuh seluruh desa pesisir dan masyarakat pesisir dari 8 (delapan) kecamatan dan 25 (dua puluh lima) desa pesisir, hal tersebut didasari karena masih tingginya sikap egosentris antar SKPD di Kabupaten Tangerang sehingga dalam pelaksanaan program Gerbang Mapan hanya berjalan kegiatan yang menjadi tanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan dinas kelautan dan perikanan yang lebih menekankan kepada pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perikanan baik tambak maupun nelayan tangkap, mangrove, dan kelompok pengolah perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. 2012. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. CV Pustaka Setia.
- Antara. (2017, January 3). 7 Persen Warga Pesisir Tangerang Miskin. Retrieved October 6, 2018, from <http://harnas.co/2017/01/03/7-persen-warga-pesisir-tangerang-miskin>
- Bostock, J., McAndrew, B., Richards, R., Jauncey, K., Telfer, T., Lorenzen, K., ... Gatward, I. 2010. Aquaculture: global status and trends. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences*, 365(1554), 2897–2912.
- BPS Kabupaten Tangerang. 2016. *Statistik Daerah Kabupaten Tangerang 2016* (Statistik Daerah Kabupaten Tangerang). Tangerang: BPS Kabupaten Tangerang.
- Cope, S., & Goodship, J. 1999. Regulating collaborative government: towards joined-up government? *Public Policy and Administration*, 14(2), 3–16.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2017. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dahuri, R., & Dutton, I. M. 2000. Integrated coastal and marine management enters a new era in Indonesia. *Integrated Coastal Zone Management*, 1(1), 1–16.
- David, O., & Gaebler, T. 1992. *Reinventing government*. Prentice Hall of India.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang. 2017. *Laporan Evaluasi Program Unggulan Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan)*. Kabupaten Tangerang: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. 1995. The Triple Helix—University-industry-government relations: A laboratory for knowledge based economic development.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. 2000. The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. 2014. The endless transition: a ‘Triple Helix’ of university industry government relations.
- Farinha, L., & Ferreira, J. J. 2013. Triangulation of the triple helix: a conceptual framework. *Triple Helix Association, Working Paper, 1*.
- Fukuyama, F. 2001. Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*, 22(1), 7–20.
- Grindle, M. S. 2004. Good enough governance: poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, 17(4), 525–548.
- Hendriks, F. 2014. Understanding good urban governance: essentials, shifts, and values. *Urban Affairs Review*, 50(4), 553–576.



- Jacobs, S. 2006. Current trends in regulatory impact analysis: the challenges of mainstreaming RIA into policy-making. *Jacobs and Associates*, 30.
- Jentoft, S., & Chuenpagdee, R. 2015. Interactive governance for small-scale fisheries. *Global Reflections*. Dordrecht, MA: Springer.
- Kumolo, T. 2017. Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. In *NAWACITA Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Martini, L., Tjakraatmadja, J. H., Anggoro, Y., Pritasari, A., & Hutapea, L. (2012). Triple Helix collaboration to develop economic corridors as knowledge hub in Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 52, 130–139.
- Mungiu-Pippidi, A. 2015. Corruption: Good governance powers innovation. *Nature News*, 518(7539), 295.
- Nederveen Pieterse, J. 2012. Twenty-first century globalization: A new development era. In *Forum for Development Studies* (Vol. 39, pp. 367–385). Taylor & Francis.
- okezone.com. (2017, January 2). Tujuh Persen Penduduk Pesisir Tangerang Masih Miskin [News]. Retrieved October 6, 2018, from <https://news.okezone.com/read/2017/01/02/338/1581001/tujuh-persen-penduduk-pesisir-tangerang-masih-miskin>
- Parisi, B. (2016, April 4). Angka Kemiskinan Kabupaten Tangerang Dan Tangsel Bertambah [News]. Retrieved October 6, 2018, from <https://www.medcom.id/nasional/daerah/zNAXeJ3K-angka-kemiskinan-kabupaten-tangerang-dan-tangsel-bertambah>
- Pemerintah Kabupaten Tangerang. 2013. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 Pemerintah Kabupaten Tangerang*. Tangerang: Pemkab Tangerang.
- Pemerintah Kabupaten Tangerang. 2017. RKPDP Kabupaten Tangerang 2017. Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- PKPT KKP. 2018. *Menjadi Pesisir Tangguh Melalui Gerbang Mapan* (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh). Tangerang. Retrieved from <http://pdpt.gaismamedia.com/menjadi-pesisir-tangguh-melalui-gerbang-mapan/>
- PKSPL IPB. 2013. *Final Report Gerbang Mapan*. Kabupaten Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- Pomeroy, R. S. 1995. Community-based and co-management institutions for sustainable coastal fisheries management in Southeast Asia. *Ocean & Coastal Management*, 27(3), 143–162.
- Rho, W.-J. 2014. Triple Helix for Social Innovation: The Saemaul Undong for Eradicating Poverty. *Journal of Contemporary Eastern Asia*, 13(1).
- Rudyanto, A. 2004. Kerangka Kerjasama dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. *Makalah Disampaikan Pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP*, 22.
- Santiso, C. 2001. Good governance and aid effectiveness: The World Bank and conditionality. *The Georgetown Public Policy Review*, 7(1), 1–22.
- Sulaiman, S. R. (2015, February 10). Kelompok Miskin Pesisir Capai 32 Persen dari Total Masyarakat Miskin Indonesia - Kompas.com. Retrieved October 6, 2018, from <https://properti.kompas.com/read/2015/02/10/141818526/Kelompok.Miskin.Pesisir.Capai.32.Persen.dari.Total.Masyarakat.Miskin.Indonesia>
- Ting, K.-H., Lin, K.-L., Jhan, H.-T., Huang, T.-J., Wang, C.-M., & Liu, W.-H. 2015. Application of a sustainable fisheries development indicator system for Taiwan's aquaculture industry. *Aquaculture*, 437, 398–407.
- Wellbrock, W., Roep, D., & Wiskerke, J. 2012. An integrated perspective on rural regional learning. *European Countryside*, 4(1), 1–16.